

PERAN DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM CANTING GULA MOJO

Geanabella Bahrossafa Agyani¹, Calvin Edo Wahyudi²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

[¹](mailto:20041010212@student.upnjatim.ac.id),

[²](mailto:kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam implementasi Program CANTING GULA MOJO sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Data dihimpun melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi; studi ini menerapkan teknik kualitatif deskriptif. Analisis dilaksanakan memakai teori peran Muhadam Labolo yang meliputi regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya Dinas Kesehatan sudah menjalankan keempat peran tersebut secara optimal melalui penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, penggerakan partisipasi masyarakat, penyediaan sarana dan sistem pendukung berbasis aplikasi GAYATRI, serta penguatan sinergi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program CANTING GULA MOJO berkontribusi dalam mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Mojokerto.

Kata kunci: **Peran Pemerintah, Dinas Kesehatan, Stunting, CANTING GULA MOJO, Kota Mojokerto**

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the Mojokerto City Health Office in implementing the CANTING GULA MOJO Program (Community Empowerment Movement for Stunting Prevention in Mojokerto City) as an effort to accelerate stunting reduction. Data was gathered through interviews, observations, and documentation; the study used a descriptive qualitative technique. Data analysis was conducted using Muhadam Labolo's role theory, which consists of four dimensions: regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst. The findings reveal that the Mojokerto City Health Office has effectively performed these roles through policy formulation and technical guidelines, community mobilization, provision of facilities and support systems through the GAYATRI application, and strengthening cross-sector collaboration. The study concludes that the CANTING GULA MOJO Program contributes significantly to integrated and sustainable stunting prevention and reduction efforts in Mojokerto City.

Keywords: *Government Role, Health Office, Stunting, CANTING GULA MOJO, Mojokerto City*

PENDAHULUAN

Stunting ialah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak yang disebabkan oleh

kekurangan gizi kronis, yang didefinisikan oleh WHO sebagai tinggi badan mengacu umur di bawah standarnya (Beal et al., 2018). Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan (Haskas, 2020). Di Indonesia, sekitar 1,5 juta bayi lahir dengan berat badan rendah. Diketahui bahwa 1 dari 5 anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting, atau terlalu pendek untuk usianya serta 1 dari 12 anak di bawah usia lima tahun mengalami kurus, atau terlalu kurus untuk tinggi badannya (Biostatistik et al., 2024). Hal ini juga konsisten dengan (Mubaroq & Wachid, 2024) yang menyatakan Dikarenakan stunting paling kerap terjadi pada seribu hari pertama sesudah kelahirannya, maka upaya yang harus dilakukan ialah dengan menurunkan angka kejadiannya. Penguatan SDM dalam penanganan stunting seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pelatihan teknis periodik, tetapi juga melalui pendekatan capability building yang terdesentralisasi (Arifin, 2021). Oleh karenanya, dalam memerangi stunting, diperlukan intervensi dari berbagai pemangku kepentingannya, dengan pemerintah daerah memainkan peranan krusial sebagai pembuat serta pelaksana kebijakan.

Melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Pengurangan Stunting, pemerintah Indonesia sudah menjadikan upaya memerangi stunting sebagai prioritas utama. Ada sejumlah inisiatif yang sedang berjalan yang menyatukan berbagai sektor untuk menerapkan penanganan yang spesifik gizi serta peka gizi (TNP2K, 2018). Frekuensi stunting sudah menurun secara nasional dalam beberapa tahun terakhir, mengacu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya mencapai target penurunan yang lebih optimal melalui penguatan program pencegahan di daerah (Kemenkes RI, 2024).

Tabel 1. Angka prevalensi stunting Jawa Timur

Tahun	Jumlah Balita	Jumlah Stunting	Prevalensi(%)
2020	1,253,391	144,759	11.5
2021	2,024,518	216,305	10.7
2022	2,007,261	190,128	9.5
2023	2,116,757	147,077	6.9
2024	2,213,827	128,673	5.8

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Tabel 2. Angka prevalensi stunting Kota Mojokerto

No.	Kota/Tahun	Angka Prevalensi (%)
1.	Kota Mojokerto 2019	9,04
2.	Kota Mojokerto 2020	7,71
3.	Kota Mojokerto 2021	4,84
4.	Kota Mojokerto 2022	3,12
5.	Kota Mojokerto 2023	2,04

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Sejumlah provinsi di Indonesia sudah berhasil menurunkan angka stunting, salah satunya ialah Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks daerah, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam konteks lokal, baik dari aspek perencanaan anggaran, distribusi pangan, pengawasan program, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan (Wulandari et al., 2026). Bahkan di Kota Mojokerto, di mana angka stunting sudah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian ini terlihat jelas. Pemerintah Kota Mojokerto menemukan ide baru, serta salah satu penemuannya ialah Program Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto (CANTING GULA MOJO). Program ini mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi percepatan penurunan stunting menuju target zero stunting.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Harmein (2023)	“Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Nagari Batu Banyak Kabupaten Solok”	Kualitatif deskriptif	Pemerintah nagari berperan dalam penyediaan anggaran, posyandu, pos gizi, dan sanitasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya.
2	Regita & Prathama (2023)	“Peran Pemerintahan Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi”	Kualitatif deskriptif	Pemerintah desa melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui pos gizi, kelas ibu hamil, bantuan sosial, dan pemantauan balita. Kendala utama terdapat pada efektivitas program konsultasi gizi serta akses sanitasi dan air bersih.
3	Rahmah (2022)	“Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi”	Kualitatif deskriptif	Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai program pencegahan stunting, namun implementasinya belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan ekonomi, dan belum maksimalnya koordinasi lintas sektor.

Sumber: Hasil penelitian yang diolah peneliti, 2026

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap peran Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sebagai aktor utama dalam implementasi Program CANTING GULA MOJO (Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada pelaksanaan program stunting secara umum, penelitian ini mengkaji bagaimana Dinas Kesehatan menjalankan fungsi kelembagaannya melalui empat dimensi peran menurut Muhadam Labolo (2014), khususnya dalam peran sebagai regulator, motivator,

fasilitator, serta katalisator. Pendekatan ini memungkinkan penelitian dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana organisasi publik berperan dalam merancang kebijakan, menggerakkan partisipasi masyarakat, menyediakan sumber daya pendukung, serta membangun kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kebaruan terhadap Program CANTING GULA MOJO yang merupakan inovasi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada intervensi kesehatan, tetapi juga mengintegrasikan keterlibatan keluarga, kader kesehatan, pemerintah kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam satu gerakan kolaboratif. Kajian mengenai implementasi program inovatif daerah semacam ini masih relatif terbatas dalam literatur administrasi publik, khususnya yang menghubungkan peran organisasi perangkat daerah dengan keberhasilan program penurunan stunting. Oleh karenanya, studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berharga dalam bidang penelitian administrasi publik, khususnya terkait fungsi organisasi publik dalam menyediakan layanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga akan memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah dalam membangun strategi pencegahan stunting yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat serta kolaborasi lintas sektor.

METODE PENELITIAN

Fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam menjalankan Program Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto (CANTING GULA MOJO) dalam Mencegah Stunting dikaji dalam studi deskriptif kualitatif ini. Lokasi penelitian berada di Kota Mojokerto, khususnya pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, beberapa kelurahan pelaksana program, serta kader kesehatan yang terlibat dalam kegiatan pencegahan stunting. Anggota staf dinas kesehatan, perangkat kelurahan, serta kader kesehatan yang mempunyai pengalaman langsung dalam melaksanakan program merupakan beberapa informan penelitian yang dipilih melalui proses pengambilan purposive sampling. Wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi dipakai dalam menghimpun data untuk studi ini. Analisa data mengikuti model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles A. Michael Huberman Johnny Saldaña (2014) Model ini terdiri dari kondensasi data, display data, serta verifikasi serta penarikan kesimpulan. Teori peran Muhadam Labolo, yang meliputi fungsi regulator, dinamisator, fasilitator, serta katalisator, dipergunakan dalam menganalisa topik penelitian. Hasil dari wawancara, observasi, serta dokumentasi dibandingkan dengan menerapkan pendekatan triangulasi sumber serta triangulasi metode dalam menjamin kualitas datanya dalam studi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan sasaran guna mengurangi stunting secepat mungkin, Pemerintah Kota Mojokerto meluncurkan Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto (CANTING GULA MOJO) pada tahun 2021. Program ini mengandalkan strategi pemberdayaan masyarakat serta mendorong kolaborasi antara berbagai sektornya. Program ini tidak hanya berfokus pada intervensi kesehatannya, akan tetapi mengintegrasikan peran pemerintah, tenaga kesehatan, kader, kelurahan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan stunting. Keberhasilan program ini turut mendapatkan pengakuan melalui penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peran Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam pelaksanaan Program CANTING GULA MOJO dianalisis menggunakan teori peran Muhadam Labolo yang meliputi regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator.

Peran Regulator

Temuan studi memperlihatkan bahwasanya Dinas Kesehatan Kota Mojokerto telah menjalankan perannya sebagai regulator dalam pelaksanaan Program CANTING GULA MOJO melalui penyusunan kebijakan, petunjuk teknis, serta pengawasan program. Peran tersebut diwujudkan dengan menjadikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan program. Peran pemerintah sebagai Regulator melibatkan penetapan arahan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan (Safitri & Rusdin, 2024). Regulasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang menjadi pedoman bagi puskesmas, kelurahan, dan kader kesehatan dalam melaksanakan berbagai fokus dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Tabel 4. Fokus program Canting Gula Mojo

No.	Fokus Canting Gula Mojo	
1.	Remaja Putri	Pemantauan tablet tambah darah oleh kader kesehatan remaja melalui “Mentari Gayatri”, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) memberikan sosialisasi pemahaman tentang bahayanya hamil diluar nikah yang dilakukan oleh pihak konseling sekolah masing-masing sekolah.
2.	Calon Pengantin	Menyediakan poli layanan terpadu di setiap puskesmas guna memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, fertilitas, dan persiapan kehamilan yang sehat.
3.	Ibu Hamil	Memberikan gelang penanda bagi ibu hamil berfungsi sebagai instrumen digital-fisik untuk memastikan pemantauan kesehatan yang intensif guna mencegah stunting sejak dini (dari hulu ke hilir).
4.	Ibu Pascasalin	Pijat lancer asi (PIJAR) serta pemantauan oleh pihak puskesmas yang

		dilakukan oleh poli layanan terpadu.
5.	Balita	Gelang penanda bagi balita stunting serta pemberian susu dan perbaikan gizi.

Sumber: Hasil penelitian yang diolah peneliti, 2026

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan yang diterapkan dalam Program CANTING GULA MOJO menggunakan pendekatan siklus kehidupan yang mencakup remaja putri, calon pengantinya, ibu hamilnya, ibu pascasalin, sampai balita. Dinas kesehatan kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu terkait pemberian ASI melalui kegiatan KP-ASI (Bakari et al., 2023)kan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya berfokus pada balita yang telah mengalami stunting, tetapi juga pada pencegahan sejak sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Setiap kelompok sasaran memperoleh intervensi yang berbeda sesuai kebutuhan, mulai dari pemberian tablet tambah darah, edukasi kesehatan reproduksi, pemantauan kehamilan, pendampingan ASI, hingga pemantauan pertumbuhan balita.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga melaksanakan fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi rutin, supervisi lapangan, rapat koordinasi, serta pemanfaatan sistem pelaporan digital. Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan target penurunan stunting yang telah ditetapkan. Menurut teori peran Muhadam Labolo, regulator merupakan pihak yang berwenang menetapkan aturan dan mengarahkan pelaksanaan program agar tujuan organisasi dapat tercapai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Mojokerto telah menjalankan fungsi tersebut secara optimal melalui penyusunan regulasi, petunjuk teknis, penetapan sasaran program, serta pengawasan pelaksanaan Program CANTING GULA MOJO. Dengan demikian, peran regulator yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan serta percepatan penurunan stunting secara terarah dan berkelanjutan.

Peran Dinamisator

Hasil studi memperlihatkan bahwasanya Dinas Kesehatan Kota Mojokerto menjalankan peran sebagai dinamisator atau penggerak utama dalam pelaksanaan Program CANTING GULA MOJO. Pemerintah berperan sebagai dinamisator melalui pembinaan, koordinasi, komunikasi, dan motivasi kepada masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai (Febriyanti et al., 2025). Sebagai leading sector dalam percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan tidak hanya bertugas melaksanakan program, tetapi juga menjadi aktor yang menginisiasi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh sumber daya yang terlibat. Peran ini terlihat dari kemampuan Dinas Kesehatan dalam membangun komitmen bersama, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan setiap pihak menjalankan tugasnya sesuai tujuan program. Dengan kata lain,

keberlangsungan Program CANTING GULA MOJO sangat bergantung pada peran aktif Dinas Kesehatan sebagai motor penggerak utama dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kota Mojokerto.

Tabel 5. Peran Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sebagai Dinamisor dalam Program CANTING GULA MOJO

No	Bentuk Peran Dinamisor	Implementasi
1	Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS)	Menyusun pedoman pelaksanaan program sebagai acuan seluruh pelaksana.
2	Pelatihan Gizi Seimbang	Memberikan pelatihan penyusunan menu bergizi bagi masyarakat dan kader.
3	Sosialisasi Stunting	Memberikan edukasi mengenai penyebab, dampak, dan pencegahan stunting.
4	Program PIK-R	Edukasi kesehatan reproduksi, gizi, dan risiko pernikahan dini bagi remaja.
5	Pembinaan Posyandu dan Puskesmas	Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
6	Monitoring dan Evaluasi	Memantau pelaksanaan program dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Sumber: Hasil penelitian yang diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Kesehatan sebagai penggerak utama diwujudkan melalui koordinasi, sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dinas Kesehatan secara aktif mengarahkan puskesmas, kader kesehatan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan Program CANTING GULA MOJO. Selain itu, berbagai kegiatan edukasi seperti pelatihan keamanan pangan, penyusunan menu gizi seimbang, dan Program PIK-R dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas pelaksana program serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stunting sejak dini. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan juga membangun sinergi lintas sektor melalui koordinasi dengan puskesmas, kelurahan, kader kesehatan, dan masyarakat. Meskipun demikian, Dinas Kesehatan tetap berperan sebagai aktor utama yang mengarahkan dan memastikan seluruh pihak bekerja secara terintegrasi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Mojokerto.

Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring serta penilaian secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan, serta juga menggalang pemangku kepentingan lainnya untuk membantu. Agar program bisa terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi berfungsi sebagai dasar dalam perbaikan dan penguatan program. Hal ini menyoroti fakta bahwa tanggung jawab fasilitator tidak hanya memandu pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwasanya program tersebut efektif serta berkelanjutan. Hal tersebut konsisten dengan studi (Aslan et al., 2024), yang menyatakan bahwasanya peranan dinamisor pemerintah dilakukan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan penguatan

koordinasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah.

Menurut teori peran Muhadam Labolo (2014), dinamisator merupakan pihak yang berfungsi menggerakkan partisipasi dan mendorong keterlibatan berbagai aktor dalam mencapai tujuan pembangunan. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya Dinas Kesehatan Kota Mojokerto telah menjalankan fungsi tersebut dengan baik melalui perannya sebagai penggerak utama Program CANTING GULA MOJO. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan Dinas Kesehatan dalam menggerakkan seluruh unsur yang terlibat untuk bekerja secara bersama-sama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Mojokerto.

Peran Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator memberikan kemudahan melalui penyediaan sarana, prasarana, pelatihan, serta akses yang mendukung keberhasilan program Pembangunan (Novianty et al., 2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Mojokerto menjalankan peran sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana, sistem pendukung, dan penguatan kapasitas pelaksana program. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan alat antropometri di puskesmas dan posyandu, distribusi tablet tambah darah bagi remaja putri serta ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita berisiko stunting. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memfasilitasi pemberdayaan keluarga melalui kegiatan UPPKA dengan dukungan teknologi tepat guna dan pelatihan penyusunan menu bergizi untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

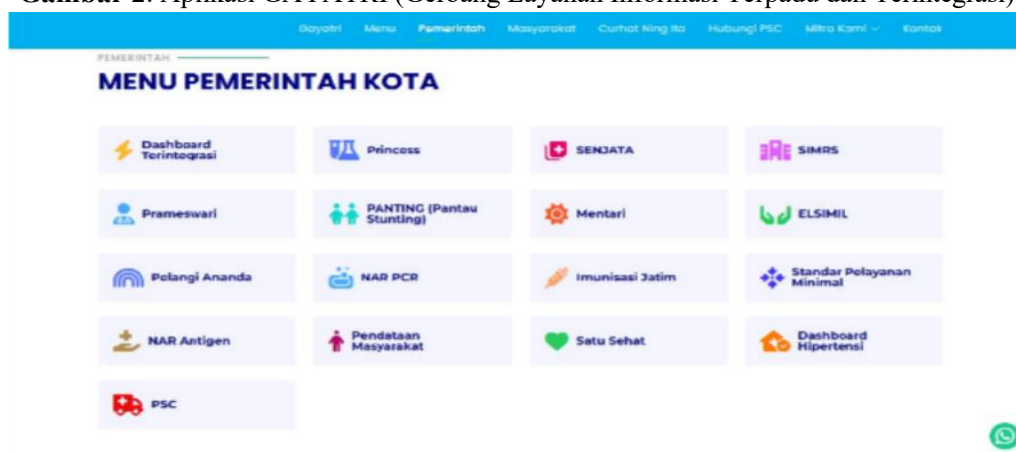
Gambar 1. Pelatihan pembuatan menu bergizi



Peran fasilitator juga terlihat melalui pemanfaatan aplikasi GAYATRI

(Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi) sebagai sistem pencatatan, pelaporan, dan pemantauan stunting berbasis data. Aplikasi ini memudahkan pendataan ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting sehingga mendukung deteksi dini, percepatan intervensi, serta koordinasi antarinstansi. Selain itu, Dinas Kesehatan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan kader posyandu terkait deteksi dini stunting, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Gambar 2. Aplikasi GAYATRI (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi)



Berlandaskan hasil ini, jelaslah bahwasanya meningkatkan proses layanan serta kemampuan sumber daya manusia sama pentingnya dengan menyediakan fasilitas fisik dalam memenuhi tugas fasilitatornya. Dengan demikian, Dinas Kesehatan Kota Mojokerto telah menjalankan fungsi fasilitator secara optimal dalam mendukung efektivitas Program CANTING GULA MOJO dan percepatan penurunan stunting di Kota Mojokerto.

Peran Katalisator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Mojokerto menjalankan peran sebagai katalisator melalui upaya mempercepat terbentuknya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program CANTING GULA MOJO. Guna mengurangi stunting secepat mungkin, Dinas Kesehatan mengkoordinasikan upaya-upaya di antara beberapa lembaga serta juga berfungsi sebagai pelaksana program. Melalui forum koordinasi, rembuk stunting, monitoring, dan evaluasi rutin, Dinas Kesehatan mampu menyatukan komitmen berbagai pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara terpadu dan terarah.

Tabel 6. Bentuk sinergi lintas sektor program Canting Gula Mojo

No.	Intansi/sektor	Bentuk sinergi dalam Program Canting Gula Mojo
1.	Dinas Pendidikan	Membantu dalam pelaksanaan edukasi gizi dan kesehatan di sekolah, memberikan edukasi tentang bahayanya hamil diluar nikah yang beresiko melahirkan bayi stunting.

2.	Dinas Sosial	Membantu dalam dukungan bantuan sosial terhadap keluarga kurang mampu untuk pemenuhan kebutuhan serta gizi dasar masyarakat.
3.	Rumah sakit daerah	Memberikan layanan rujukan kesehatan ibu dan anak, penanganan kasus gizi buruk, serta pendampingan medis terhadap balita stunting.
4.	Kecamatan dan Kelurahan	Berperan dalam pendataan keluarga berisiko stunting, menjadi penggerak masyarakat, penyelenggara posyandu, serta monitoring kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
5.	Puskesmas	Menjadi pelaksana teknis di lapangan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Sumber: Hasil penelitian yang diolah peneliti, 2026

Sinergi lintas sektor yang dibangun melibatkan berbagai instansi selaras dengan tugas serta fungsinya masing-masing. Dinas Pendidikan berperan dalam memberikan edukasi gizi, kesehatan reproduksi, dan pencegahan pernikahan dini kepada remaja. Dinas Sosial mendukung pemenuhan kebutuhan dasar keluarga melalui bantuan sosial bagi kelompok rentan. Rumah sakit daerah memberikan layanan rujukan kesehatan ibu dan anak serta penanganan kasus gizi buruk. Kecamatan dan kelurahan berperan dalam pendataan keluarga berisiko stunting, penggerakan masyarakat, dan pemantauan kondisi wilayah. Sementara itu, puskesmas berperan sebagai pelaksana teknis dengan memberikan layanan yang berkaitan dengan kesehatan ibu serta anak serta mengawasi pertumbuhan balita. Fakta bahwasanya berbagai kelompok ini bekerja sama memperlihatkan bahwasanya upaya memerangi stunting di Kota Mojokerto merupakan upaya bersama, serta bukan hanya upaya sektor kesehatan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Dinas Kesehatan secara aktif membangun komunikasi dan koordinasi antarinstansi melalui pertemuan rutin, sosialisasi, serta evaluasi bersama. Peran ini memungkinkan setiap pihak memperoleh informasi yang sama, memahami tugas masing-masing, serta mampu menyelesaikan berbagai kendala program secara cepat dan terkoordinasi. Dengan demikian, berbagai intervensi yang dilakukan dapat saling melengkapi dan mendukung pencapaian tujuan program secara lebih efektif.

Peran katalisator merupakan kemampuan pemerintah mempercepat proses pemberdayaan masyarakat melalui upaya penyelesaian masalah, peningkatan produktivitas, dan pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat (Firdaus, 2020). Temuan ini konsisten dengan (Atika et al., 2025) menjelaskan bahwa peran katalisator diwujudkan melalui penguatan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif serta berkelanjutan. Oleh karenanya, peran katalisator Dinas Kesehatan dalam Program CANTING GULA MOJO tidak hanya terlihat dari keberhasilannya membangun koordinasi lintas sektor, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan kolaborasi sehingga upaya

percepatan penurunan stunting di Kota Mojokerto dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Mojokerto telah menjalankan peran sebagai regulator, dinamisor, fasilitator, serta katalisator dalam pelaksanaan Program CANTING GULA MOJO. Sebagai regulator, Dinas Kesehatan menyusun kebijakan dan petunjuk teknis program. Sebagai dinamisor, Dinas Kesehatan berperan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan koordinasi. Sebagai fasilitator, Dinas Kesehatan menyediakan sarana, prasarana, dukungan teknologi melalui aplikasi GAYATRI, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader. Sebagai katalisator, Dinas Kesehatan membangun sinergi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program CANTING GULA MOJO didukung oleh kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan intervensi yang berkelanjutan sejak remaja hingga balita. Oleh karena itu, program ini dapat menjadi model praktik baik bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan strategi percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Serang. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 13, 71–86.
- Aslan, M., Madani, M., & Aksa, N. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Terminal Di Terminal Regional Daya Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1(No.3), 198–209.
<https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kolaborasi/Article/View/700%0Ahttps://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kolaborasi/Article/Viewfile/700/658>
- Atika, S. N., Samugyo Ibnu Redjo, & Dede Sri Kartini. (2025). Collaborative Governance Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Garut. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(2), 203–213.
<https://doi.org/10.31334/Transparansi.V8i2.5306>
- Bakari, L., Antu, Y., & Katili, A. Y. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Dan Implikasinya Bagi Kemadirian Kesehatan Di Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(4), 1219–1232.
<https://doi.org/10.37606/Publik.V10i4.991>
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A Review Of Child Stunting Determinants In Indonesia. *Maternal And Child Nutrition*, 14(4), 1–10. <https://doi.org/10.1111/Mcn.12617>

- Biostatistik, J., Kesehatan, I., & Sofiyulloh, S. (2024). *Faktor Kontributor Prevalensi Stunting : Studi Kasus Jawa Timur Tahun 2022 Faktor Kontributor Prevalensi Stunting : Studi Kasus Jawa Timur Tahun 2022 Contributor Factors Of Stunting Prevalence : Case Study East Java , 2022. 5(1). <https://doi.org/10.7454/Bikfokes.V5i1.1087>*
- Febriyanti, S. A., Setiasih, E. N., Rhama, B., Selvia, F., & Raya, U. P. (2025). *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah Vol 7 No 2 Tahun 2025 , P 212-220. 7(2), 212–220.*
- Firdaus, R. (2020). *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal. 3(1), 32–40.*
- Harmein, K., & Yusran, R. (2023). Peran Pemerintah Nagari Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Nagari Batu Banyak. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 3808–3814. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6730>*
- Haskas, Y. (2020). Haskas, Yusran. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis, 15(2), 2302–2531.*
- Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan. *UGM Press.*
- Matthew B. Miles A. Michael Huberman Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook.*
- Mubaroq, M. H., & Wachid, A. (2024). *Upaya Pemerintah Daerah Kudus Dalam Pencegahan Stunting. 66–76.*
- Novianty, R., Dewi, S. P., & Anwar, K. (2024). Strategi Digitalisasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Pasca Pandemi. *Jurnal Administrasi Bisnis, 4(2), 50–59. <https://doi.org/10.31294/Jab.V4i2.5238>*
- Regita, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 12(1), 121–128.*
- RI, K. K. (2024). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024.*
- Safitri, D., & Rusdin, R. B. (2024). Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Memberdayakan UMKM Di Kota Palu. *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 1(1), 137–153.*
- TNP2K. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting).*
- Wulandari, S., Santosa, P., Hidayat, T., & Permana, R. (2026). *Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Penanganan Stunting Di. 13, 816–826.*